

BAB I

PENDAHULUAN

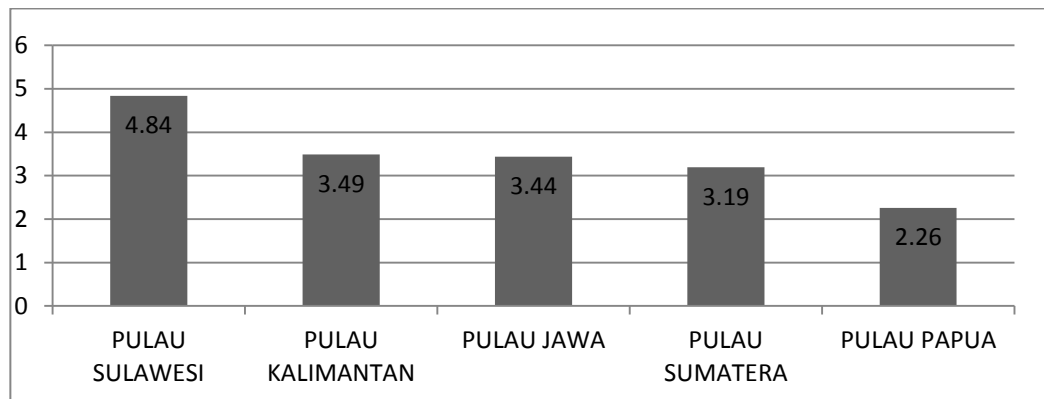
1.1 Latar Belakang

Isu mengenai permasalahan yang dialami di negara-negara berkembang tidak terlepas dari kendala pertumbuhan ekonomi. Analisis makroekonomi sering kali menemui permasalahan berupa kelesuan atau terkadang pertumbuhan ekonomi yang lambat salah satunya diakibatkan oleh COVID-19 yang hampir seluruh dunia terdampak olehnya, sehingga berdampak buruk pada perekonomian. Secara umum perekonomian tumbuh dengan kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan potensi pertumbuhannya. Akibat pertumbuhan yang lambat ini, perekonomian tidak dapat mencapai tingkat lapangan kerja penuh, sehingga berbagai faktor ekonomi menjadi tantangan yang terus menerus harus dihadapi dan diatasi dalam jangka panjang.

Indonesia terdiri dari lima pulau besar yang tersebar meliputi Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua. Pulau-pulau ini adalah rumah bagi 38 Provinsi dan Negara yang memiliki jumlah pulau terbanyak di dunia. Dibandingkan pulau-pulau lain, Pulau Jawa masih mendominasi perekonomian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi di Pulau Jawa menyumbang 57,27 persen terhadap PDB negara pada triwulan II tahun 2023, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5,18 persen. Jumlah ini mewakili kontribusi ekonomi provinsi yang signifikan. Sebaliknya Pulau Sulawesi menyumbang 7,13 persen, Pulau Kalimantan 8,32 persen, dan Pulau Sumatera 21,94 persen terhadap PDB.

Berdasarkan data gambar 1.1 dapat dilihat laju pertumbuhan di Pulau Sumatera mencapai 3,19 persen yang mana Pulau ini menempati posisi ke 4 atau kedua yang paling rendah setelah Pulau Papua. Ini membuktikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera masih lambat, sedangkan PDB perkapita Pulau Sumatera menempati posisi kedua setelah Pulau Jawa yang dimana cukup besar dibandingkan Pulau besar lainnya, yang mencapai nilai sebesar

Rp149,9 juta per tahun. Kondisi ini tentu menjadi masalah yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan laju pertumbuhan Pulau Sumatera.



Gambar 1.1 Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi di Lima Pulau Besar di Indonesia Tahun 2019-2023 (Persen)

Sumber Data: SIMREG Bappenas, 2023 (Data Diolah)

Pada tahun 2023, kontribusi Pulau Sumatera terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih cukup tinggi yaitu sebesar 4,72 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,05 persen merupakan penyumbang perekonomian nasional terbesar kedua setelah Jawa. Meski demikian, perekonomian Pulau Sumatera tetap menunjukkan kinerja yang baik, terbukti dengan pertumbuhan ekonomi wilayah yang terus mengalami peningkatan dari 3,23 persen di tahun 2021 menjadi 4,69 persen di tahun 2022.

Berdasarkan nilai PDRB AHK Provinsi Pulau Sumatera dari tahun 2019–2023 dalam data tabel 1.1 mengalami peningkatan setiap tahunnya dari nilai PDRB sebesar 41.527,11 milyar rupiah di tahun 2019 meningkat dalam 4 tahun sebesar 45.617,79 Milyar rupiah ditahun 2023. Terlihat PDRB dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, PDRB Kepulauan Riau adalah yang tertinggi, hal ini terjadi karena faktor geografisnya yang strategis sebagai gerbang utama menuju Singapura dan Malaysia, potensi SDA yang dimiliki seperti hasil perikanan dan pariwisata yang kuat serta kegiatan ekonominya yang berkembang pesat, sedangkan Provinsi Aceh memiliki PDRB terendah di Pulau Sumatera tetapi nilai PDRB nya mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ketahun dalam lima tahun terakhir. Ini terjadi karena beberapa alasan diantaranya keterpencilan geografis, pernah terjadi konflik bersenjata, lokasi zona yang rawan bencana, dan keterbatasan sumber daya sehingga hal tersebut dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.1 PDRB Atas Harga Konstan Menurut Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Milyar Rupiah)

PROVINSI	TAHUN					Rata-rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
ACEH	24.842,30	25.018,28	25.356,45	26.061,53	26.800,13	25.615,74
SUMUT	36.843,59	36.175,16	36.582,07	37.780,55	39.140,19	37.304,31
SUMBAR	31.427,29	30.696,21	31.264,98	32.166,90	33.188,21	31.748,72
RIAU	72.509,14	76.884,74	78.319,23	80.773,87	83.070,74	78.311,54
JAMBI	41.812,35	41.926,04	42.898,41	44.514,61	46.007,34	43.431,75
SUMSEL	37.125,75	37.323,24	38.182,24	39.718,92	41.277,53	38.725,54
BENGKULU	23.504,53	23.105,92	23.545,64	24.238,47	24.947,62	23.868,44
LAMPUNG	28.894,50	26.746,64	27.149,57	27.973,81	28.907,12	27.934,33
B.BELITUNG	37.173,14	36.307,61	36.620,69	38.743,76	39.908,84	37.750,81
KEP.RIAU	81.138,52	85.012,58	86.584,63	89.637,36	92.930,20	87.060,66
Rata-rata	41.527,11	41.919,64	42.650,39	44.160,98	45.617,79	43.175,18

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Laju ekspansi ekonomi suatu wilayah dapat menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunannya. Pemeriksaan statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikasi utama kondisi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah saat ini. Potensi suatu wilayah ditunjukkan oleh produk regional brutonya yang terus meningkat dan keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan kebijakan perekonomian ditunjukkan dengan PDRB yang semakin tinggi.

Berdasarkan tabel data 1.2 yang tercantum bisa dilihat rata-rata pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera periode tahun 2019-2023 dengan nilai 3,19 persen dan dengan beberapa fluktuasi atau kenaikan dan penurunan dalam 5 tahun terakhir. Bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, nilai rata-rata Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi, Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai sebesar 3,89 persen disusul Povinsi Jambi dan Bengkulu dengan nilai sebesar 3,46 dan 3,35 persen sedangkan Provinsi Riau menunjukkan laju pertumbuhan terendah sebesar 2,76 persen. Sedangkan untuk Pulau Sumatera Pada tahun 2018, ada pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 4,63 persen, dan tahun 2020 mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dapat terlihat laju pertumbuhan ekonomi paling rendah

sebesar -1,26 persen saja dan ditahun berikut nya terjadi kenaikan yang cukup signifikan walaupun belum sebesar ditahun 2019 namun dapat memperbaiki perekonomian akibat pengaruh situasi dari Covid-19 yang mulai merambah ke Indonesia pada awal tahun 2020, sehingga mempengaruhi perekonomian saat itu.

Tabel 1.2 Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Persen)

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)					Rata-rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	4,14	-0,37	2,81	4,21	4,23	3,00
Sumatera Utara	5,22	-1,07	2,61	4,73	5,01	3,30
Sumatera Barat	5,01	-1,61	3,29	4,36	4,62	3,13
Riau	2,81	-1,13	3,36	4,55	4,21	2,76
Jambi	4,35	-0,51	3,7	5,12	4,66	3,46
Sumatera Selatan	5,69	-0,11	3,58	5,23	5,08	3,89
Bengkulu	4,94	-0,02	3,27	4,31	4,26	3,35
Lampung	5,26	-1,66	2,77	4,28	4,55	3,04
K. Bangka Belitung	3,32	-2,29	5,05	4,4	4,38	2,97
Kepulauan Riau	4,83	-3,80	3,43	5,09	5,20	2,95
Rata-Rata P.Sumatera	4,56	-1,26	3,39	4,63	4,62	3,19

Sumber Data: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data Tabel 1.2 dimana data berfokus pada 5 tahun saja agar lebih menggambarkan kondisi atau tren terkini yang mendasari masalah penelitian. Sehingga dapat melihat pertumbuhan ekonomi meningkat seiring dengan maju dan perkembangan modal seperti investasi, tenaga kerja seperti meningkatkan lapangan pekerjaan, infrastruktur yang memadai, dan administrasi pemerintah salah satunya pengelolaan pengeluaran pemerintah yang baik, hal tersebut juga tidak terlepas dari kondisi penurunan karna keterbatasan faktor tersebut. Menurut teori Sadono Sukirno (2010), peningkatan PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia mendefinisikan Pertumbuhan ekonomi adalah hasil dari aktivitas ekonomi yang lebih besar, yang meningkatkan kemakmuran secara keseluruhan dan jumlah produk dan jasa yang dihasilkan.

**Tabel 1.3 Data Investasi PMA Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023
(Juta US\$)**

Provinsi	Tahun					Rata-rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	137,5	51,1	203,3	127,6	248,6	153,6
Sumatera utara	379,5	974,8	580,4	1.316,1	1.181,3	886,4
Sumatera barat	157,1	125,6	67,0	95,6	120,7	113,2
Riau	1.034,0	1.078,0	1.921,4	2.748,7	2.042,3	1.764,9
Jambi	54,6	27,0	50,9	39,2	45,1	43,4
Sumatera Selatan	736,5	1.543,9	1.259,7	1.226,3	1.478,6	1.249,0
Bengkulu	144,8	192,3	23,7	52,2	76,1	97,8
Lampung	155,2	498,4	173,8	247,8	220,6	259,2
K.Bangka Belitung	88,7	48,4	44,7	129,7	72,5	76,8
Kepulauan Riau	1.363,4	1.649,4	1.043,7	934,0	764,1	1.150,9
Rata-rata P.Sumatera	425,1	618,9	536,9	691,7	625,0	579,5

Sumber Data: Badan Pusat Statisti, 2023

Berdasarkan tabel data 1.3 terlihat bahwa investasi PMA Pulau Sumatera dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dimana rata-rata investai PMA selama 5 tahun terakhir mencapai 579,5 US\$ dengan nilai investasi PMA tertinggi adalah ditahun 2022 yang nilai sebesar 691,72 US\$ dan nilai investasi PMA terendah di tahun 2019 dengan nilai sebesar 425,13 US\$. Sedangkan untuk provinsi dapat dilihat dalam 5 tahun terakhir Provinsi Jambi memiliki investasi PMA terendah di Pulau Sumatera dengan nilai rata-rata sebesar 43,4 US\$ dan investai PMA tertinggi terdapat di Provinsi Riau 1.764 US\$. Menurut BPK RI, Provinsi Riau menduduki peringkat kelima tertinggi di tingkat nasional sedangkan Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, dan Jawa Timur berada di posisi kedua dan ketiga berdasarkan jumlah investasi yang dilakukan. Hal ini disebabkan oleh realisasi investasi yang menyumbang pada penyerapan tenaga kerja (TKI) sebanyak 50.888 orang pada tahun 2022.

Berdasarkan data tabel 1.4, investasi PMDN di Pulau Sumatera menunjukkan peningkatan setiap tahun dalam lima tahun terakhir, dengan rata-rata investasi PMDN sebesar 11.751,4 milyar rupiah. Nilai investasi PMDN tertinggi adalah ditahun 2023 yang nilai sebesar 14.939,3 Milyar Rupiah dan nilai investasi PMDN terendah di tahun 2019 dengan nilai sebesar 9.049,2 Milyar

Rupiah saja. Jika dilihat dari nilai untuk provinsi dalam 5 tahun terakhir Provinsi Sumatera Barat memiliki investasi PMDN terendah di Pulau Sumatera dengan nilai rata-rata sebesar 3.472,9 Milyar Rupiah, sedangkan rata-rata investai PMDN tertinggi terdapat Provinsi Sumatera Utara dengan nilai investasi mencapai 20.157,2 milyar rupiah. Hal tersebut terjadi karena tidak terlepas dari kekayaan SDA nya, salah satunya kelapa sawit yang menarik investor di sektor agribisnis, pembangunan infrastruktur yang baik serta dukungan pemerintah melalui insentif dan kemudahan yang diberikan kepada para investor yang terdapat dalam Peraturan Daerah No. 3 tahun 2023 yang membahas tentang memberikan kemudahan investasi dan intensif investasi yang berfungsi sebagai stimulus untuk meningkatkan nilai investasi di wilayah tersebut.

Tabel 1.4 Data Investasi PMDN Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Milyar Rupiah)

Provinsi	Tahun					Rata-rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	3.606,9	8.241,1	7.904,7	4.424,2	8.883,3	6.612,0
Sumatera utara	19.749,0	18.189,5	18.484,5	22.789,2	21.574,0	20.157,2
Sumatera barat	3.026,6	3.106,2	4.183,7	2.559,8	4.488,2	3.472,9
Riau	26.292,2	34.117,8	24.997,8	43.062,0	48.243,3	35.342,6
Jambi	4.437,4	3.511,7	6.204,2	8.882,7	8.939,0	6.395,0
Sumatera Selatan	16.921,1	15.824,5	16.266,9	23.526,0	25.602,4	19.628,2
Bengkulu	5.458,1	5.399,2	4.923,5	6.957,3	7.218,7	5.991,4
Lampung	2.428,9	7.120,5	10.513,2	5.809,2	7.625,8	6.699,5
K.Bangka Belitung	2.915,2	1.863,8	3.677,4	6.309,0	7.961,4	4.545,4
Kepulauan Riau	5.656,4	14.249,0	9.768,7	4.817,4	8.856,6	8.669,6
Rata- Rata	9.049,2	11.162,3	10.692,5	12.913,7	14.939,3	11.751,4

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023

Investasi dapat membantu mencapai tujuan pembangunan ekonomi di Sumatera, yang antara lain adalah investasi dapat mengurangi biaya transportasi, memudahkan aliran barang dan jasa, mengembangkan bisnis, dan menciptakan kesamaan ekonomi melalui pajak pendapatan. Untuk memenuhi permintaan, investasi juga dapat menghasilkan produksi lebih banyak barang dan jasa, sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Menurut teori Harrod-Domar, investasi dalam pembangunan modal akan meningkatkan kemampuan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa serta meningkatkan *demand* yang efektif dari masyarakat secara keseluruhan.

Investasi PMA dan PMDN keduanya memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di suatu daerah. Namun jika investasi PMDN lebih berhasil mendongkrak pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, investasi PMA lebih berhasil mempercepat pertumbuhan pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertahankan dan menaikkan investasi PMA serta PMDN guna mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Rata-rata jumlah tenaga kerja Sumatera dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan lima tahun sebelumnya, seperti terlihat pada data pada tabel 1.5, dengan rata-rata sebesar 2.819.499 juta jiwa.

Tabel 1.5 Data Penduduk Bekerja (Angkatan Kerja) Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018-2022 (Jiwa)

Provinsi	Tahun					rata-rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	2.219.698	2.359.905	2.361.300	2.394.994	2.447.345	2.356.648
Sumatera utara	6.681.224	6.842.252	7.035.850	7.197.374	7.549.537	7.061.247
Sumatera barat	2.460.554	2.581.524	2.581.444	2.688.164	2.844.925	2.631.322
Riau	2.996.079	3.022.988	3.148.947	3.168.929	3.002.334	3.067.855
Jambi	1.691.782	1.739.003	1.746.840	1.797.819	1.802.264	1.755.542
Sumatera Selatan	3.968.499	4.091.383	4.179.708	4.289.704	4.399.659	4.185.791
Bengkulu	981.095	1.031.881	1.021.775	1.037.496	1.069.615	1.028.372
Lampung	4.077.930	4.280.109	4.284.320	4.387.966	4.697.658	4.345.597
K.Bangka Belitung	715.927	699.881	701.441	730.972	749.815	719.607
Kepulauan Riau	935.682	1.016.600	1.087.419	1.155.997	1.019.356	1.043.011
Rata2 P.Sumatera	2.672.847	2.766.553	2.814.904	2.884.942	2.958.251	2.819.499

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023

Sementara itu, tampak bahwa Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk usia kerja tertinggi, sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai persentase penduduk usia kerja terendah yaitu hanya sekitar 700 ribu

jiwa. Hal yang menyebabkan rendahnya jumlah penduduk bekerja di Provinsi Bangka Belitung salah satunya karna penduduk yang relatif kecil dan perekonomiannya yang sangat bergantung pada sektor pertambangan, khususnya timah serta sektor perkebunan dan perikanan. Sektor-sektor ini mungkin tidak memerlukan tenaga kerja dalam jumlah besar atau memiliki karakteristik musiman, yang mempengaruhi jumlah penduduk yang bekerja secara tetap.

Dalam Teori Permintaan tenaga kerja Keynesian menyatakan bahwa tingkat pengangguran dan jumlah tenaga kerja yang bekerja dipengaruhi oleh permintaan agregat. Peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan permintaan agregat melalui peningkatan konsumsi, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga setiap peningkatan dalam jumlah tenaga kerja dapat memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) pada ekonomi, meningkatkan pendapatan dan pengeluaran secara keseluruhan.

Tenaga kerja dapat membantu mendorong produktivitas yang merupakan salah satu elemen yang mendukung peningkatan kemajuan ekonomi. Pada umumnya, ekspansi ekonomi di Sumatera terutama disebabkan oleh pertumbuhan industri, seperti pertambangan, transportasi, akomodasi dan makanan. Tenaga kerja dapat membantu mengurangi biaya transportasi, mempermudah pergerakan barang dan jasa, dan memperluas pasar. Pendapat ahli juga menunjukkan bahwa tenaga kerja dapat membantu mengurangi jarak antara wilayah, mempermudah pergerakan masyarakat, dan mempermudah akses ke fasilitas publik.

Peningkatan TIK dapat diperkirakan melalui daftar kemajuan inovasi data dan Persuratan atau yang disebut dengan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK). Keadaan IP-TIK di Indonesia menunjukkan dampak positif yang berpotensi meningkatkan produktivitas. Potensi perkembangan TIK, kesenjangan digital antar daerah dan pertumbuhan perkembangan IP-TIK semuanya dievaluasi menggunakan IP-TIK (Kamilla et al., 2021). Dengan demikian IP-TIK dapat menjadi indikator untuk mengukur kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Pulau Sumatera dan

memberikan informasi yang berguna untuk perencanaan strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Berdasarkan dari data tabel 1.6 dibawah ini mengenai faktor Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa Indeks Pembangunan TIK, dapat dilihat dari nilai rata-rata IP-TIK di Pulau Sumatera dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, dimana rata-rata IP-TIK tertinggi di Pulau Sumatera terdapat ditahun 2023 dengan nilai sebesar 6,03 persen, sedangkan IP-TIK terendah terdapat ditahun 2019 dengan nilai sebesar 5.24 persen.

Tabel 1.6 Data Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Poin)

Provinsi	Tahun					Rata-rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	4,91	5,27	5,40	5,60	5,88	5,41
Sumatera Utara	5,19	5,44	5,75	5,90	6,04	5,66
Sumatera Barat	5,25	4,52	5,92	6,01	6,12	5,56
Riau	5,33	5,74	5,90	6,02	6,07	5,81
Jambi	5,17	5,49	5,73	5,80	5,92	5,62
Sumatera Selatan	4,91	5,30	5,64	5,76	5,88	5,50
Bengkulu	5,21	5,50	5,85	5,95	6,04	5,71
Lampung	4,83	5,15	5,58	5,63	5,78	5,39
K.Bangka Belitung	5,25	5,54	5,71	5,82	5,95	5,65
Kepulauan Riau	6,36	6,46	6,58	6,69	6,66	6,55
Rata-rata Sumatera	5,24	5,44	5,81	5,92	6,03	5,69

Sumber Data: Badan Pusat Statistik, 2022

Dari nilai rata-rata Provinsi dengan score IP-TIK paling tinggi terdapat di Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai sebesar 6,55%. Hal ini dikarenakan beberapa faktor termasuk infrastruktur yang lebih baik, adopsi teknologi yang lebih luas dan keterampilan masyarakat yang lebih tinggi dalam menggunakan teknologi. IP-TIK diukur berdasarkan tiga subindeks yaitu infrastruktur, penggunaan dan keahlian. Kepulauan Riau menunjukkan perkembangan yang pesat dalam ketiga aspek ini, yang berkontribusi pada nilai indeks yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Sumatera, sedangkan berdasarkan rata-rata dari data Indeks Pembangunan TIK terendah di provinsi adalah milik Provinsi

Lampung yang rata-ratanya sebesar 5,39 persen saja, hal ini bisa disebabkan karena Provinsi Lampung memiliki ketiga aspek IP-TIK yang terbilang rendah dibandingkan Provinsi lain.

Dalam teori Solow yang menyatakan bahwa kemajuan teknologi dianggap sebagai variabel eksogen yang mempengaruhi pertumbuhan output, dan kemajuan teknologi berfungsi sebagai komponen residu (Solow Residual) yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, diluar akumulasi modal dan tenaga kerja. Dengan kata lain peningkatan produktivitas yang dihasilkan dari kemajuan teknologi dianggap sebagai hasil dari inovasi yang terjadi secara independen dari kondisi ekonomi lainnya. Menurut Amrina dan Primandhana (2022) Teknologi Informasi dan Komunikasi mencakup semua alat dan sistem yang mendukung penyimpanan, pemrosesan, dan pengolahan informasi, serta mempermudah berbagai kebutuhan manusia yang dapat memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

1.2 Rumusan Masalah

Selama 10 tahun terakhir, provinsi-provinsi di Pulau Sumatera mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang bervariasi. Namun, tercatat pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi melambat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya akibat merebaknya wabah COVID-19 di Indonesia. Berbagai permasalahan ekonomi muncul akibat permasalahan ini, yang mengakibatkan ekonomi tumbuh lambat. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian khusus terhadap faktor-faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, khususnya di Pulau Sumatera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaruh variabel-variabel independen seperti Investasi PMDN, Investasi PMA, Angkatan Kerja, dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. Berdasarkan masalah ini, beberapa pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan:

1. Bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi, Investasi PMA-PMDN, Angkatan Kerja dan Indeks Pembangunan TIK Provinsi di Pulau Sumatera periode tahun 2014-2023?
2. Bagaimana pengaruh Investasi PMA-PMDN, Angkatan Kerja dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera periode tahun 2014-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perkembangan pertumbuhan ekonomi, Investasi PMA, Investasi PMDN, Angkatan Kerja dan Indeks Pembangunan TIK Provinsi di Pulau Sumatera periode tahun 2014-2023?
2. Untuk mengevaluasi dampak Investasi PMA, PMDN, Angkatan Kerja dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2014-2023?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis
Hal ini bertujuan agar penelitian ini dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan, referensi penelitian, meningkatkan pengetahuan khalayak luas tentang topik ini dan sumber informasi bagi saya dan mahasiswa, khususnya mahasiswa ekonomi pembangunan, yang mempelajari bagaimana investasi PMA dan PMDN, angkatan kerja serta Indeks Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
2. Secara praktis
Studi ini diharapkan dapat memperluas pemahaman empiris tentang pengaruh Investasi PMA, Investasi PMDN, angkatan Kerja, dan Indeks Pembangunan TIK terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di Pulau Sumatera. Penulis berharap hasil penelitian ini akan bermanfaat dan diterima oleh pihak-pihak terkait, serta dapat menjadi referensi dan masukan yang berguna bagi mereka.